

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan teori, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 2013-2015 maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota daerah pemekaran di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah PAD maka akan semakin tinggi alokasi untuk belanja modal.
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota daerah pemekaran di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa adanya SiLPA akan membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran lainnya.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja modal pada kabupaten/kota daerah pemekaran di Indonesia. Namun, terdapat pengaruh yang negatif antara variabel Dana Alokasi Umum terhadap modal. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dana transfer ini lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan belanja lain seperti belanja pegawai, belanja rutin, dan belanja operasional lain sehingga alokasi untuk belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.
4. Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Dana Alokasi Umum secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota daerah pemekaran di Indonesia.

#### **1.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta simpulan mengenai penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

**Ghina Siti Fatimah, 2017**

*PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagi pemerintah daerah pemekaran sebaiknya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah pemekaran mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan proporsi terbesar dari belanja modal berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya pada kabupaten Tambrauw, kabupaten ini memiliki PAD yang rendah dikarenakan kepatuhan pajak masih lemah, tingkat pendapatan masyarakat masih rendah, koordinasi, komunikasi antara SKPD pemungut pajak masih lemah untuk itu peraturan daerah menjadi kunci untuk mengatur pemungutan pajak, sehingga badan/instansi terkait dapat melakukan tugas dan fungsinya.
2. Bagi pemerintah daerah pemekaran diharapkan lebih memperhatikan proporsi Dana Alokasi Umum yang dialokasikan pada belanja modal sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa belanja modal ditetapkan 30% dari jumlah belanja daerah. Mengingat hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang bertanda negatif terhadap belanja modal untuk itu pemerintah daerah dapat menekan jumlah belanja lain seperti belanja pegawai maupun belanja operasional dengan cara menekan jumlah pegawai dengan tidak melakukan perekrutan pegawai baru dan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti luas wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan memperpanjang rentang waktu lebih dari tiga tahun sehingga dapat dilakukan generalisasi dari hasil penelitian tersebut.